

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Frekuensi bencana tanah longsor (*landslide*) di Indonesia semakin meningkat. Bencana ini telah menyebabkan kerugian material, korban jiwa, dan mengganggu rasa aman masyarakat. Sejumlah wilayah di Indonesia memiliki karakteristik perbukitan dan pegunungan yang bisa menyebabkan sebagian wilayah di Indonesia memiliki tingkat kerawanan longsor. Tanah longsor adalah kejadian alam akibat pergerakan massa tanah atau batuan dengan berbagai variasi, seperti runtuh batu atau gumpalan tanah yang besar (Ruyani, 2023). Tanah longsor merupakan proses erosi yang ditandai dengan perpindahan massa tanah atau batuan dalam volume besar dari satu lokasi ke lokasi lain (Yassar et al., 2020). Dari kedua definisi tersebut, longsor dapat didefinisikan sebagai pergerakan material dari lereng atas ke bawah, termasuk batuan, tanah dan campuran keduanya dalam jumlah besar ke titik tertentu di bawah pengaruh gravitasi.

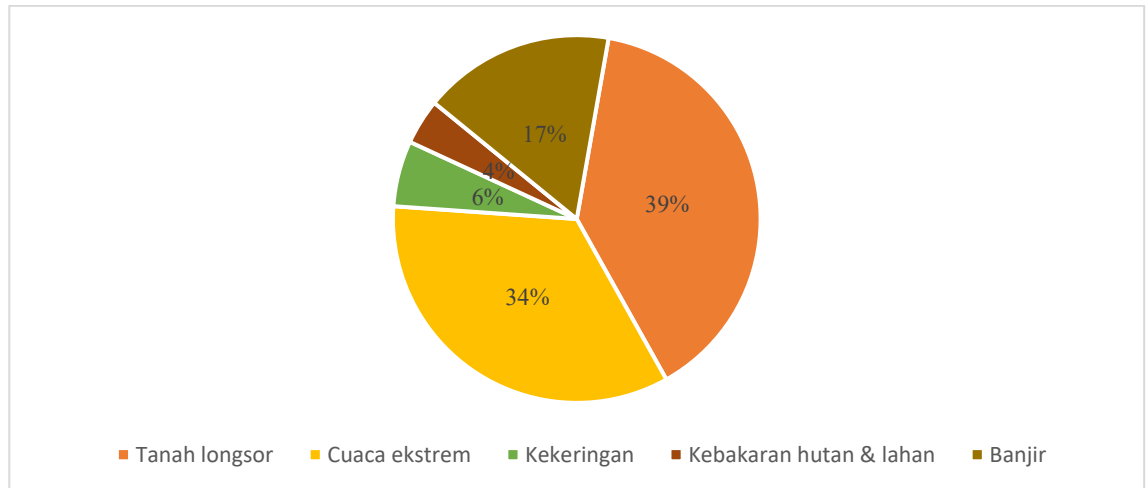
Negara Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana sangat tinggi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua Samudra serta termasuk wilayah yang dilintasi oleh jalur cincin api pasifik. Keadaan tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Laporan WRR (*World Risk Report*) menempatkan Indonesia di peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia setelah Filipina (Pristiandaru,

2024). Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah bencana tahun 2022 mencapai 3.544 dan meningkat signifikan di tahun 2023 mencapai 4.940 (Pratiwi, 2024).

Kota Semarang yang secara administratif adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah setiap tahun menghadapi bencana alam tanah longsor. Pada tahun 2024 Kota Semarang sudah mengalami 12 kejadian bencana tanah longsor meliputi daerah Jomblang Candisari, Lempongsari Gajahmungkur, Tandang Tembalang, Peterongan Semarang Selatan dan Pudakpayung Banyumanik (Saufi, 2024). BPBD Kota Semarang berdasarkan laporan resmi mengungkapkan bahwa penyebab tanah longsor adalah tingginya intensitas hujan di Kota Semarang. Bencana tanah longsor di Kota Semarang sering terjadi akibat kondisi perbukitan dan dataran tinggi yang disertai curah hujan tinggi (Masyhuri et al., 2021).

Hasil data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Kota Semarang selama 3 tahun terakhir dari tahun 2020 – 2023 sudah mengalami 88 kejadian bencana tanah longsor dan merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Semarang. Hal tersebut bisa dilihat melalui data dibawah ini

**Gambar 1. 1 Grafik Kejadian Bencana Kota Semarang 2020 – 2023**



**Sumber :** Data yang telah diolah oleh penulis, 2025

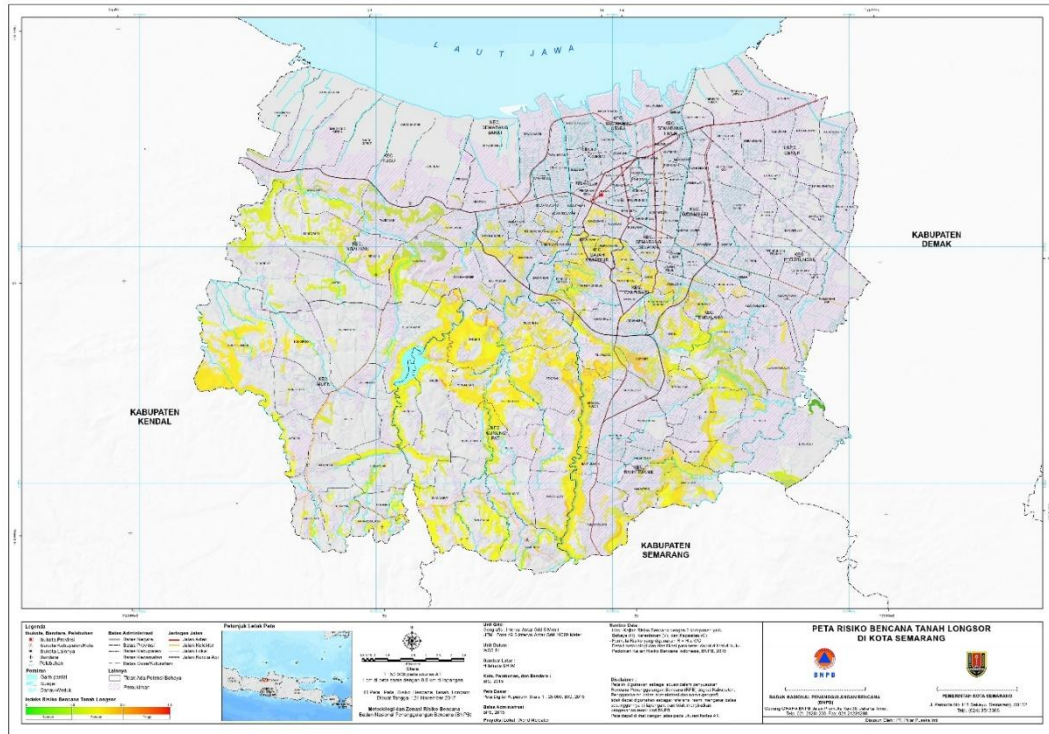
Rincian kejadian bencana Kota Semarang tahun 2020 – 2023 Tanah longsor (88 kejadian), Banjir (38 kejadian), Cuaca ekstrem (77 kejadian), Kekeringan (13 kejadian), Kebakaran hutan dan lahan (9 kejadian). Total kejadian bencana : 225 kejadian. Data longsor Kota Semarang selama 3 tahun terakhir dijabarkan dengan rincian sebagai berikut Tahun 2020 (38 kejadian), Tahun 2021 (31 kejadian), Tahun 2022 (12 kejadian) dan Tahun 2023 (7 kejadian). Total kejadian longsor : 88 kejadian (website dibi.bnpb.go.id). Berdasarkan data diatas bahwa dalam 3 tahun terakhir Kota Semarang memiliki tingkat kejadian bencana longsor yang relatif tinggi dibanding bencana lain.

Topografi Kota Semarang cukup beragam dengan ketinggian wilayah yang berkisar dari 0,75 hingga kurang lebih 348 meter di atas permukaan laut. Kota ini memiliki keunikan, yaitu memiliki dataran rendah, dataran tinggi dan

wilayah pesisir. Wilayah Selatan dari Kota Semarang yang sering disebut sebagai “Semarang Atas” memiliki morfologi perbukitan dengan memiliki ketinggian 90,56 sampai 348 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang memiliki daerah rawan longsor yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu rawan gerakan tanah dan daerah sesar aktif, kedua daerah tersebut tersebar ke beberapa kecamatan di Kota Semarang. Wilayah Semarang Atas menghadapi ancaman longsor yang disebabkan oleh pesatnya pembangunan di daerah tersebut dan menyebabkan berkurangnya kawasan hulu.

Ancaman tanah longsor di Kota Semarang diidentifikasi melalui peta risiko. Peta risiko memuat gabungan antara bahaya, kerentanan dan kapasitas terhadap tingkat ancaman nyata bencana tanah longsor. Peta risiko disusun oleh BNPB dan Pemerintah Kota Semarang. Pemetaan risiko memiliki tujuan untuk menilai kemungkinan (probabilitas) kerugian akibat dari bencana yang didasarkan pada faktor bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas masyarakat di suatu daerah (Kinanti et al., 2022). Indeks peta risiko bencana tanah longsor terbagi menjadi 3, yaitu warna hijau (rendah), warna kuning (sedang) dan warna merah (tinggi). Kota Semarang memiliki indeks risiko bencana tanah longsor sedang dengan dominasi warna kuning, seperti gambar dibawah ini. Indeks risiko sedang - tinggi mendominasi wilayah Kecamatan GunungPati, Banyumanik, Mijen, Tembalang, Ngaliyan dan sebagian Kecamatan Candisari.

**Gambar 1. 2 Peta Risiko Bencana Longsor Kota Semarang**



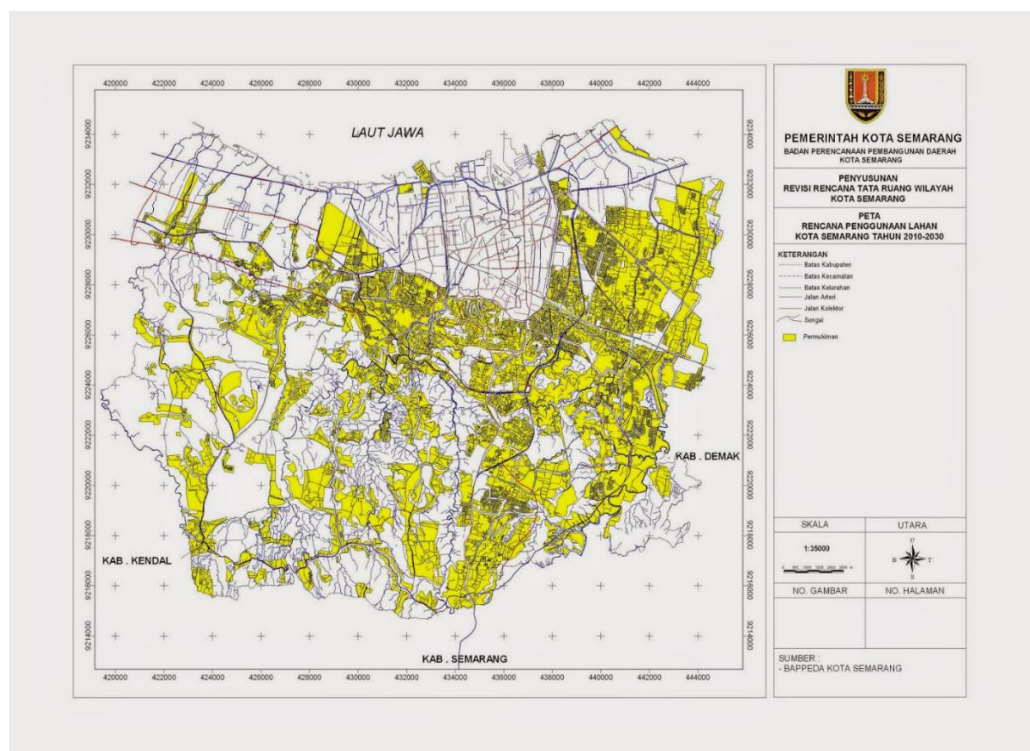
**Sumber : BNPB, 2025**

Kota Semarang mengalami perubahan alih fungsi lahan yang cepat sehingga membuat rendahnya kualitas tutupan lahan di Semarang Atas dan memperburuk risiko longsor, terutama di wilayah Semarang Atas (Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, 2021). Data IKLH (Indeks kualitas hidup) Kota Semarang perlu ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan optimal. Proporsi kesesuaian penggunaan ruang dengan ketentuan tata ruang di Kota Semarang, yaitu 95,89% dan angka ini belum mencapai angka yang optimal (Peraturan

Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, 2021).

Merujuk pada peta rencana penggunaan lahan Kota Semarang periode 2010 – 2030 disusun oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Semarang, terlihat jelas sebagian besar wilayah Kota Semarang, khusus di wilayah Semarang Atas, telah mengalami peningkatan area permukiman (warna kuning).

**Gambar 1.3 RTRW Permukiman Kota Semarang**



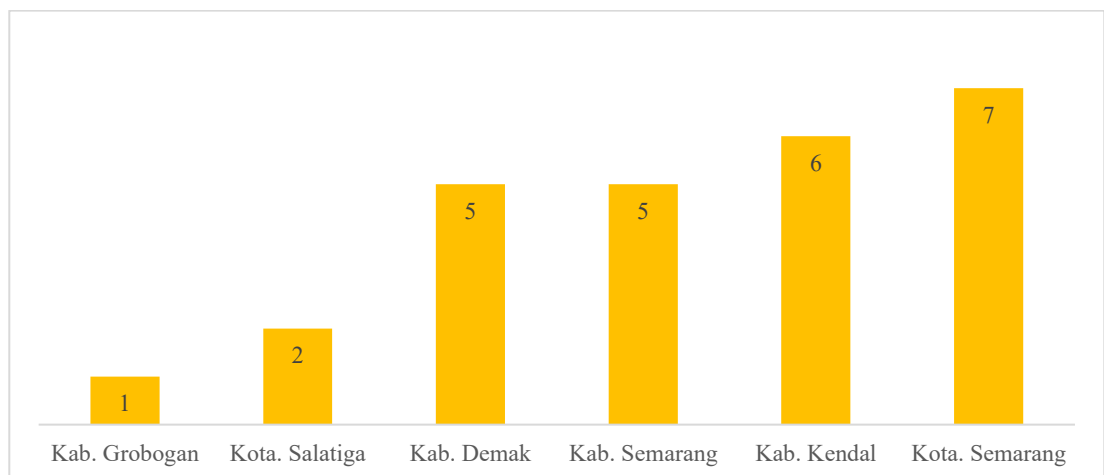
**Sumber :** Bappeda Kota Semarang, 2011

Perluasan kawasan permukiman tersebut menunjukkan adanya alih fungsi lahan dari kawasan hijau dan pertanian menjadi kawasan terbangun. Fenomena ini memperkuat temuan dari Perda Kota Semarang Nomor 6 tahun

2021 tentang RPJMD 2021 – 2026 yang menyebutkan bahwa kualitas tutupan lahan di wilayah Semarang Atas mengalami penurunan akibat pesatnya pembangunan dan perubahan fungsi lahan. Perubahan penggunaan lahan tersebut berdampak langsung pada menurunnya daya serap air tanah dan meningkatkan risiko bencana tanah longsor di wilayah topografi curam, seperti di wilayah Semarang Atas, Kecamatan GunungPati, Banyumanik, dan Mijen.

Kota Semarang adalah bagian dari wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kota ini berada dalam kawasan KedungSepur (Kab. Kendal – Kab. Demak – Kab. Semarang – Kota. Semarang – Kota. Salatiga – Kab. Grobogan) dengan wilayah tersebut Kota Semarang menjadi kota yang paling banyak mengalami bencana alam longsor pada tahun 2023. Hal tersebut bisa dilihat melalui gambar dibawah ini :

**Gambar 1. 4 Bencana Longsor Wilayah KedungSepur Tahun 2023**



**Sumber :** Data yang telah diolah penulis, 2025

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 1,694 Juta jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 4.534 jiwa/km (BPS Kota Semarang, 2024).

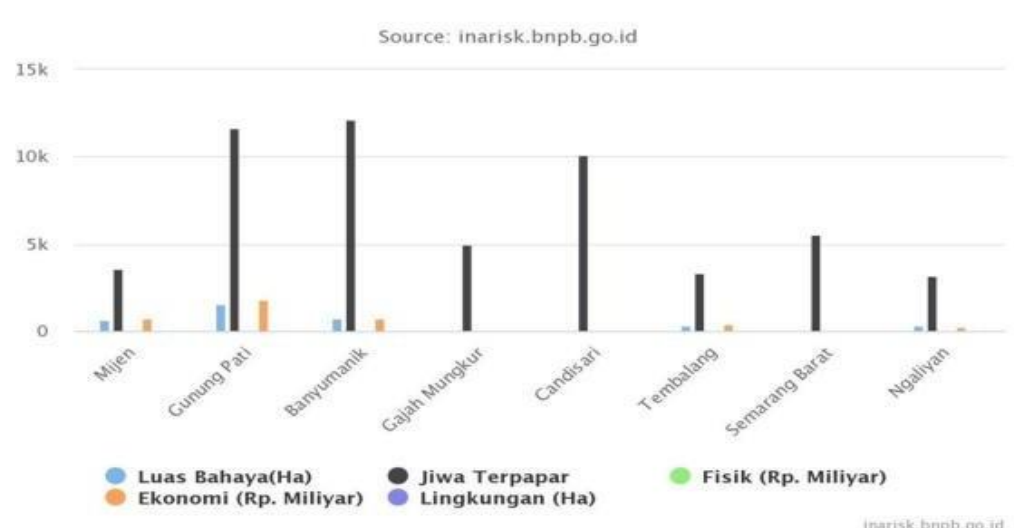
Kota Semarang menjadi salah satu dari kota terpadat yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga membuat potensi bahaya bagi penduduk di Kota Semarang terutama bagi penduduk yang berada di daerah rawan longsor dan pergerakan tanah. Kota Semarang memiliki beberapa kawasan yang rentan terjadinya longsor dan gerakan tanah terutama di Semarang Atas. Dikutip dari RPJMD Kota Semarang tahun 2021 - 2026 wilayah rentan longsor dan gerakan tanah ini terbagi menjadi beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Gunungpati, Banyumanik dan Mijen (Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, 2021).

Kecamatan di Kota Semarang yang paling sering mengalami tanah longsor adalah kecamatan Gunungpati. Selama kurung waktu 2020 – 2023 Kecamatan gunungpati sering mengalami bencana tanah longsor dengan kategori risiko tinggi. Risiko tinggi ini didasarkan pada wilayah bahaya paling luas ketika terjadi bencana tanah longsor (BPBD Kota Semarang, 2023).

Peningkatan bencana tanah longsor di Kota Semarang yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhinya . Faktor pertama beban tanah atau tekanan yang berasal dari bangunan di atasnya, faktor kedua kondisi lereng dengan tingkat kemiringan yang tinggi, dan faktor ketiga, yaitu curah hujan tinggi serta hilangnya vegetasi untuk menahan luncuran tanah (BPBD Kota Semarang, 2023). Hal ini sejalan dengan kondisi bahwa Kecamatan GunungPati merupakan salah satu wilayah yang sering mengalami bencana tanah longsor. Hal ini ditunjukkan melalui adanya peta grafik potensi longsor

yang diukur melalui 5 indikator, seperti luasan bahaya, jiwa terpapar, harga bangunan fisik, nilai ekonomi dan nilai lingkungan. Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada kecamatan gunung pati karena memiliki topografi perbukitan dan lereng curam yang menyebabkan tingkat kerawanan longsor relatif tinggi. Gunung pati termasuk wilayah semarang atas yang mengalami perubahan fungsi lahan sehingga rentan terhadap bencana tanah longsor terutama saat curah hujan tinggi.

**Gambar 1. 5 Grafik Potensi Longsor Tahun 2023 - 2027**



**Sumber :** Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota

Semarang 2023 - 2027

Kota Semarang dalam rangka menanggulangi bencana alam mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang menetapkan lembaga, yaitu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Semarang sebagai institusi

yang bertugas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah. BPBD Kota Semarang berkedudukan di bawah serta memiliki tanggung jawab kepada walikota. Kepemimpinan BPBD Kota Semarang berada di bawah seorang kepala badan. BPBD Kota Semarang mempunyai fungsi dalam merealisasikan tugasnya sebagai lembaga penanggulangan bencana di Kota Semarang.

Upaya BPBD Kota Semarang dalam menangani tanah longsor dinilai masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan produktivitas dan responsivitas yang belum baik (Grasia et al., 2023). Efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor bergantung pada koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan pelibatan masyarakat, kendala koordinasi yang terjadi akibat keterbatasan personel dan infrastruktur (Azzhara & Warsono, 2025). Kolaborasi antar stakeholder dalam proses koordinasi dipengaruhi oleh komitmen bersama, kejelasan peran antar lembaga dan komunikasi yang efektif (Masyhuri et al., 2021). Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) menjelaskan bahwa permasalahan strategis dialami BPBD Kota Semarang, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum berjalan optimal, belum lengkap pedoman teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana, belum memadai dukungan sumber daya untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (BPBD Kota Semarang, 2023).

Berbagai laporan media menunjukkan bahwa penanganan pasca longsor di berbagai lokasi di Kota Semarang masih sangat terbatas dan bersifat sementara. Bencana longsor di Roro Jonggrang Timur, Kelurahan Manyaran

sudah dibiarkan selama lima tahun dan hanya ditutup dengan terpal saat hujan deras (Wassalim, 2025). Longsor di jalan alternatif Mangkang – Ngaliyan yang terjadi Februari 2025 hanya diatasi secara darurat dengan terpal sambil menunggu proposal perbaikan formal (Wassalim, 2025). Selain itu, longsor di Perumahan Bintang Kencana Bukit Regency, Kecamatan Banyumanik mengalami longsor pada April 2024 hingga kini belum mendapatkan rehabilitasi struktural karena pengembang belum menyerahkan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas). Upaya perbaikan belum dilakukan dan hanya penanganan tumpuan struktural sementara (Setiawan, 2024). Upaya perbaikan PSU melibatkan OPD terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

**Gambar 1. 6 Longsor Manyaran**



**Sumber :** Radar Semarang.Jawa Pos, 2025

Penanganan pasca longsor memerlukan koordinasi yang kuat antar organisasi perangkat daerah, tidak hanya dilakukan oleh BPBD sebagai *leading*

*sector*, tetapi melibatkan OPD lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kecamatan dan kelurahan. Koordinasi dilakukan melalui pertukaran informasi, penentuan pembagian tugas, penyaluran bantuan sampai perbaikan infrastruktur pasca bencana. Namun dalam pelaksanaan koordinasi terdapat hambatan penanganan, seperti masalah administrasi PSU yang belum diserahkan, penanganan longsor bersifat sementara, keterbatasan sumber daya, ketidaklengkapan pedoman teknis sehingga penanganan pasca bencana tanah longsor seperti longsor manyaran belum mendapatkan penanganan permanen selama beberapa tahun.

Koordinasi antar OPD menjadi penting dalam penanganan pasca bencana dalam rangka memberikan pelayanan publik dan memberikan kenyamanan masyarakat. Wilayah pasca bencana longsor memerlukan penanganan yang optimal secara rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membuat normalisasi aspek kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan ketertiban.

Penelitian sebelumnya yang membahas penanganan bencana di Kota Semarang berfokus pada kolaborasi pemerintah, mitigasi bencana dan penanganan tanggap darurat bencana. Penelitian ini memiliki fokus pada koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintahan dalam penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang. Fokus penelitian pada lingkup Kecamatan GunungPati sebagai daerah yang memiliki potensi dan peningkatan bencana tanah longsor yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, sangat penting untuk mengkaji bagaimana koordinasi yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Semarang dalam menanggulangi ancaman bencana tanah longsor. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bentuk koordinasi yang dijalankan oleh BPBD Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor penghambatnya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan belakang tersebut, terdapat beberapa poin penting dalam identifikasi masalah penelitian ini :

1. Tingkat kejadian bencana tanah longsor di Kota Semarang yang tergolong tinggi

Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kota Semarang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari BNPB mencatat terdapat 88 kejadian longsor selama periode 2020 – 2023 dengan 12 kejadian tambahan di awal tahun 2024. Kejadian ini mengindikasikan bahwa longsor adalah bencana yang paling dominan terjadi di Kota Semarang dibandingkan bencana lainnya, seperti banjir dan cuaca ekstrem. Wilayah yang paling terdampak adalah berada di Semarang atas, yaitu Kecamatan Gunungpati. Daerah tersebut memiliki topografi perbukitan dengan curah hujan yang tinggi. Frekuensi ini menunjukkan perlunya penanganan pasca bencana yang berjalan baik.

2. Perubahan fungsi lahan dan menurunnya kualitas tutupan lahan

Perubahan fungsi lahan di wilayah Semarang Atas menyebabkan penurunan kualitas tutupan lahan. Menurut RPJMD Kota Semarang 2021 – 2026 terjadi alih fungsi lahan yang cepat di wilayah perbukitan akibat pembangunan infrastruktur dan permukiman. Perubahan fungsi lahan ini memperburuk risiko longsor terutama di daerah, seperti Kecamatan Gunungpati, Banyumanik dan Mijen. Vegetasi yang sebelumnya berfungsi sebagai penguat tanah telah berkurang secara signifikan. Dampak dari kondisi ini adalah semakin tingginya kerentanan wilayah – wilayah tersebut terhadap longsor terutama saat curah hujan tinggi.

3. Belum optimalnya penanganan pasca bencana tanah longsor

Upaya penanganan pasca bencana tanah longsor oleh BPBD Kota Semarang masih terbatas dan cenderung bersifat sementara. Rehabilitasi dan rekonstruksi belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya, kurang pedoman teknis, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi tersebut berdampak pada belum tertanganinya kerusakan infrastruktur penting secara menyeluruh, mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi membahayakan keselamatan warga. Contohnya adalah talud longsor di kelurahan manyarah yang belum mendapatkan penanganan dalam 5 tahun terakhir

4. Kurangnya koordinasi penanganan pasca bencana tanah longsor

Berbagai laporan media menunjukkan bahwa penanganan pasca bencana longsor di Kota Semarang masih terbatas dan cenderung bersifat sementara. Longsor di manyaran, mangkang, ngaliyan dan banyumanik belum mendapatkan penanganan permanen akibat kendala administrasi, keterbatasan sumber daya dan proses birokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan pasca bencana memerlukan koordinasi yang kuat antar OPD, seperti BPBD, DPU, Disperkim, Dinsos, Dinkes, kecamatan, kelurahan untuk pertukaran informasi, pembagian tugas, penyaluran bantuan dan perbaikan infrastruktur. Koordinasi yang belum optimal menyebabkan penanganan pasca bencana masih sementara dan berjalan lambat.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan BPBD Kota Semarang dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain dalam penanganan pasca bencana tanah longsor ?
2. Faktor apa saja yang menghambat koordinasi BPBD Kota Semarang dengan OPD terkait dalam penanganan pasca bencana alam tanah longsor ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bentuk koordinasi BPBD Kota Semarang dengan OPD dalam penanganan pasca bencana tanah longsor.

2. Mengidentifikasi faktor penghambat koordinasi BPBD Kota Semarang dengan OPD terkait dalam penanganan pasca bencana tanah longsor.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Aspek teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi penelitian mendatang tentang koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penanganan pasca bencana.

2. Aspek praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis dalam memahami, mempelajari praktik koordinasi antar OPD, secara khusus peran BPBD Kota Semarang dalam menangani pasca bencana tanah longsor.

- b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BPBD Kota Semarang dalam meningkatkan koordinasi sehingga penanganan pasca bencana longsor menjadi lebih tepat, cepat dan terintegrasi.

- c. Bagi penulis lain

Penelitian ini diupayakan menjadi referensi informasi, pengetahuan dan rujukan untuk penelitian yang akan datang sehingga bisa menghasilkan penelitian yang lebih sempurna dan akurat.

## **1.6 Kajian Teori**

### **1.6.1 Penelitian Terdahulu**

Koordinasi antar OPD (organisasi perangkat daerah) berperan penting bagi BPBD Kota Semarang dalam penanganan pasca bencana tanah longsor. Koordinasi yang efektif diperlukan agar tugas dan fungsi penanggulangan pasca bencana dapat berjalan terpadu menyeluruh, dan tepat sasaran. Berikut ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanganan bencana:

Penelitian yang berjudul “Analisis Mitigasi Bencana Banjir di Kota Tangerang Selatan”. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Taslim, Ahmad Jamil Pasaribu dan Azhari Aziz Samudra. Metode penelitian kualitatif *literature review*. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penting BPBD Tangerang dalam langkah – langkah pengurangan risiko bencana banjir di kawasan permukiman Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori penyebaran informasi kebencanaan (Sakurai & Murayama) dan teori banjir (Ali). Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa BPBD dalam melaksanakan mitigasi bencana dilakukan melalui tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana yang memerlukan kerja sama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan BPBD Kota Tangerang, pada kerja

sama ini memerlukan strategi komunikasi dalam mitigasi bencana dan peran aktif masyarakat. Tujuan dari adanya kerja sama dan strategi komunikasi adalah untuk melindungi masyarakat dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi, teori yang digunakan dan fokus jenis bencana. Penelitian ini menggunakan teori manajemen publik, teori koordinasi (Ndraha, 2015), faktor penghambat koordinasi (Handayani, 2006), tempat penelitian berada di Kota Semarang, yaitu BPBD Kota Semarang yang membahas penanganan pasca bencana alam tanah longsor. Persamaan penelitian ini adalah metode kualitatif dan fokus koordinasi dalam penanganan pasca bencana.

Penelitian yang berjudul “Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upaya Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Kota Medan”. Penelitian ini ditulis oleh Cindy Monica dan Siti Hazzah Nur R. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi (Hasibuan). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi antara BPBD dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam penanggulangan pasca bencana di Kota Medan melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam koordinasi antara BPBD dan Dinas PU belum berjalan optimal,

penyebabnya berasal dari tidak ada rencana kerja yang disusun secara bersama, jumlah pertemuan untuk melakukan komunikasi masih kurang, keterbatasan anggaran Dinas PU, keterbatasan dalam kapasitas SDM dan pembagian kerja yang belum berjalan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi, jenis bencana dan jenis fokus bencana. Penelitian ini menggunakan teori manajemen publik, teori koordinasi (Ndraha, 2015) dan teori faktor penghambat koordinasi (Handayani, 2006), tempat penelitian ini berada di Kota Semarang serta memiliki fokus jenis bencana tanah longsor. Persamaan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian yang berjudul “Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang”. Penelitian ini ditulis oleh Aziz Masyhuri, Hartuti Purnaweni, dan Augustin Rina Herawati. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses kolaborasi antar stakeholders dalam manajemen bencana tanah longsor di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan konsep *collaborative governance* (Ansell & Gash) dan manajemen bencana (Nurjana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang belum berjalan optimal karena kurangnya koordinasi dan peran antar *stakeholders* diluar pemerintah, hal ini menyebabkan bencana tanah longsor masih sering terjadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi, teori, fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teori manajemen publik, teori koordinasi (Ndraha, 2015) dan teori faktor penghambat (Handayani, 2006), fokus penelitian ini, yaitu koordinasi antar organisasi perangkat daerah yang tidak melibatkan aktor diluar pemerintah. Lokasi penelitian ini terletak di BPBD Kota Semarang dan Kecamatan GunungPati sebagai salah satu kecamatan yang sering mengalami bencana alam tanah longsor. Persamaan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan memiliki fokus bencana yang sama, yaitu bencana alam tanah longsor di Kota Semarang.

Penelitian yang berjudul “Urgensi Koordinasi dalam Organisasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia : Sebuah Tinjauan Pustaka”. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Aldizar Akbar, Hamidah Dwiningtias dan Hayatul Khairul Rahmat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang pentingnya koordinasi dalam tanggap darurat bencana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep dalam, yaitu konsep tanggap darurat (Lubis), koordinasi (Muzdalifah), dan sistem komando penanganan darurat bencana (Oktarina). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam tanggap darurat bencana menjadi sangat penting agar dapat mencapai tujuan bersama dalam penanganan tanggap darurat bencana, yaitu meminimalisir akibat dari bencana, kehilangan nyawa dan kerusakan yang timbul dari bencana tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi, teori, fokus bencana, dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teori manajemen publik, teori koordinasi (Ndraha, 2015) dan teori faktor penghambat koordinasi (Handayani, 2006). Penelitian ini berfokus pada bencana tanah longsor yang terjadi di Kota Semarang dengan fokus instansi, yaitu BPBD Kota Semarang. Persamaan penelitian ini adalah membahas koordinasi dalam penanganan bencana

Penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Menangani Pasca Bencana Tanah Longsor di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini ditulis Arif Fahhan Suroso. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam penanganan pasca longsor di Kabupaten Banyumas, Desa Gumelar. Teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu *Collaborative Governance* (Ansell & Gash). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi antara BPBD, Dinas PU Kabupaten Banyumas dan melibatkan perusahaan swasta serta masyarakat sudah berjalan sesuai dengan tahapan kolaborasi. Pada pelaksanaan kolaborasi tersebut sudah berjalan baik, tetapi terdapat kendala berupa pihak yang kurang sadar dan tidak ingin terlibat dalam kegiatan penanganan pasca bencana tanah longsor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan pada lokasi, teori yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan teori

manajemen publik, teori koordinasi (Ndraha, 2015) dan teori faktor penghambat koordinasi (Handayani, 2006). Lokasi penelitian ini berada di Kota Semarang kantor BPBD. Persamaan penelitian ini adalah memiliki fokus bencana yang sama, yaitu bencana tanah longsor dan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian yang berjudul “Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo di Makassar”. Penelitian ini ditulis oleh Mursalin dan Nurasia Natsir. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Tallo (DAS Tallo), Kota Makassar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori koordinasi lintas sektor. Hasil penelitian ini adalah dalam pengelolaan (DAS Tallo), Kota Makassar belum berjalan optimal, kendala yang dihadapi berupa lemahnya komitmen dan sinkronisasi program antar instansi terkait. Hal ini membuat terjadinya tidak efisien dan pemborosan sumber daya.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus pada penelitian yang dilakukan pada penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang, dengan menggunakan teori manajemen publik, teori koordinasi (Ndraha, 2015) dan teori faktor penghambat koordinasi (Handayani, 2006). Persamaan penelitian ini adalah menggunakan teori yang sama, yaitu teori koordinasi dan memiliki kesamaan dalam metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Rangka Mendukung Ketahanan Wilayah”. Penelitian ini ditulis oleh Lukman Hakim Baihaqi dan Anwar Kurniadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kebijakan pengurangan risiko bencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mitigasi risiko bencana banjir dan pengaruhnya terhadap ketahanan wilayah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketahanan wilayah (Budiman), teori implementasi kebijakan (Edward III), dan teori ketahanan nasional (Sunardi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar dinas di Kabupaten Bandung telah berjalan cukup baik, meskipun pada tingkat implementasi masih ditemukan kendala terutama dalam sinergi pentahelix (akademis, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah dan TNI/Polri) akibat ego sektoral dan perbedaan kepentingan. Upaya sosialisasi melalui forum formal maupun informal belum sepenuhnya menjangkau atau dipahami oleh masyarakat. Sementara keterbatasan anggaran, sarana, dan kualitas, kuantitas sumber daya manusia turut menghambat efektivitas kebijakan.

Perbedaan penelitian terletak pada teori, lokasi dan fokus yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen publik, teori koordinasi (Ndraha, 2015) dan teori faktor penghambat koordinasi (Handyaningrat, 2006), lokasi penelitian berada di BPBD Kota Semarang

serta fokusnya pada penanganan pasca bencana tanah longsor. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Banjir di Kalimantan Selatan”. Penelitian ini ditulis oleh Safa Muzdalifah, Sandra Bhakti Mafriana dan Andri Tenri Sompia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa wawancara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan banjir. Teori yang digunakan adalah koordinasi (Handayaniingrat) yang membagi bentuk koordinasi, yaitu horizontal, vertikal dan diagonal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD berjalan cukup efektif melalui pola koordinasi horizontal dengan SKPD daerah, vertikal dengan BNPB dan BPBD kabupaten/kota, serta diagonal dengan TNI, Polri, dan kementerian terkait. Efektivitas tersebut tampak dalam penggunaan media komunikasi daring selama pandemi, keterlibatan lintas sektor dalam fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, serta adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya koordinasi. Kendati demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah egosentrisme instansi pemerintah yang cenderung menghambat integrasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir.

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus bencana. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada bencana tanah longsor di Kota Semarang di Instansi BPBD Kota Semarang. Persamaan penelitian ini

adalah menggunakan teori koordinasi dan manajemen publik serta kesamaan dalam metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian yang berjudul “Pelibatan Media Massa dalam *Collaborative Governance* Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandung”. Penelitian ini ditulis oleh Heru Rochmansjah. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran media massa berkontribusi dalam kerangka *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash) dan teori mitigasi media massa (Nugroho & Sulistyorini). Media massa menjadi aktor pentahelix bersama pemerintah, swasta, akademis dan komunitas masyarakat. Hasil penelitian menegaskan bahwa media massa memiliki peran strategis dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir, tetapi perlu peningkatan sinergi agar fungsinya tidak hanya informatif, melainkan juga partisipatif dan kolaboratif.

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi, fokus, dan teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen publik, teori koordinasi (Ndraha, 2015) dan teori faktor penghambat koordinasi (Handayani, 2006), fokus penelitian pada penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang pada BPBD Kota Semarang. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian yang berjudul “Koordinasi Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Cimahi”. Penelitian ini ditulis oleh Wahyudi, Muradi, dan Neneng Yani Yuningsih. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi menurut (G.R. Terry). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar OPD dalam penanggulangan banjir di Kota Cimahi masih belum optimal. Koordinasi cenderung berjalan parsial karena hanya didominasi oleh BPBD dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), sementara keterlibatan forum penanggulangan risiko bencana (FPRB) maupun partisipasi masyarakat masih sangat minim. Kondisi ini menyebabkan penanganan banjir belum terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta masih terkendala oleh pola birokrasi yang kaku dan lemahnya kolaborasi lintas sektor.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi, yaitu BPBD Kota Semarang dengan fokus pada bencana tanah longsor. Persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode kualitatif.

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Muhamad Taslim, Ahmad Jamil Pasaribu, Azhari Aziz Samudra (2024)	Menganalisis peran BPBD Kota Tangerang dalam mitigasi bencana alam banjir	a. Teori Banjir b. Teori penyebaran informasi kebencanaan (Sakurai & Murayama)	Deskriptif kualitatif – <i>literature review</i>	Keberhasilan BPBD dalam mitigasi bencana memerlukan kerja sama instansi Pemkot Tangerang dengan BPBD di setiap tahapan manajemen bencana serta peran serta masyarakat
2.	Cindy Monica, Siti Hazzah Nur R (2021)	Menganalisis koordinasi antara BPBD dengan Dinas PU dalam penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan	a. Teori Koordinasi (Hasibuan)	Deskriptif kualitatif	Koordinasi antara BPBD dan Dinas PU belum berjalan optimal karena tidak ada perencanaan kerja bersama, keterbatasan anggaran, keterbatasan kapasitas SDM
3.	Aziz Masyhuri, Hartuti Purnaweni & Augustin Rina Herawati (2021)	Menganalisis kolaborasi antar stakeholders dalam manajemen bencana tanah longsor di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	a. Teori Manajemen Bencana (Nurjanah) b. Teori <i>Collaborative Governance</i> (Ansell & Gash)	Deskriptif Kualitatif	Proses kolaborasi antar stakeholders belum berjalan optimal yang membuat bencana tanah longsor masih sering terjadi

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
4.	Ahmad Aldizar Akbar, Hamidah Dwiningtias & Hayatul Khairul Rahmat (2024)	Menganalisis pentingnya koordinasi saat bencana alam dalam organisasi tanggap darurat	a. Tanggap darurat (Lubis) b. Koordinasi (Muzdalifah) c. Sistem Komando Penanganan Bencana (Oktarina)	Metode kepustakaan	Koordinasi dan kerja sama antar instansi sangat penting dalam rangka mampu mencapai tujuan dalam tanggap darurat bencana
5.	Arif Fahan Suroso (2024)	Menganalisis proses kolaborasi dalam penanganan masalah tanah longsor di Kabupaten Banyumas.	a. Teori <i>Collaborative Governance</i> (Ansell & Gash)	Deskriptif kualitatif	Kolaborasi antar aktor pemerintah dan aktor luar pemerintah dalam penanganan pasca bencana tanah longsor sudah berjalan optimal
6.	Mursalin, Nurasia Natsir (2024)	Menganalisis koordinasi dalam pengelolaan DAS Tallo Kota Makassar	a. Teori Pengelolaan DAS b. Teori Koordinasi	Deskriptif kualitatif	Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal karena disebabkan beberapa kendala, seperti kurangnya komitmen dan sinkronisasi program
7.	Lukman Hakim Baihaqi, Anwar Kurniadi (2023)	Menganalisa kebijakan pengurangan risiko bencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mitigasi risiko bencana banjir dan	a. Teori ketahanan wilayah (Budiman) b. Teori ketahanan nasional (Sunardi) c. Implementasi Kebijakan Publik (Edward III)	Deskriptif kualitatif	Koordinasi antar dinas di Kabupaten Bandung telah berjalan cukup baik, meskipun pada tingkat implementasi masih ditemukan kendala dalam sinergi pentahelix

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
		pengaruh terhadap ketahanan wilayah			
8.	Safa Muzdalifah, Sandra Bhakti Mafriana & Andri Tenri Sompa (2023)	Menganalisis tingkat efektivitas koordinasi antara BPBD dengan Pemprov Kalsel dalam penanganan banjir	a. Teori Koordinasi (Handayaniingrat)	Deskriptif kualitatif	Koordinasi penanganan bencana berjalan cukup efektif ditinjau dari aspek teori koordinasi
9.	Heru Rochmansjah (2023)	Menganalisis peran stakeholders diluar pemerintah dalam penanganan bencana di Kota Bandung	a. Teori <i>Collaborative Governance</i> (Ansell & Gash) b. Media Massa Mitigasi Bencana (Nugroho & Sulistyroini)	Deskriptif kualitatif	BPBD Kota sukabumi menggunakan konsep pentahelix dalam menangani bencana. Kendala penanganan bencana, seperti sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur.
10.	Bagus Wahyudi, Muradi, & Neneng Yani Yuningsih (2024)	Menganalisis koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan banjir di Kota Cimahi	a. Teori koordinasi (G.R Terry)	Deskriptif kualitatif	Koordinasi dalam penanggulangan bencana di Kota Cimahi belum optimal, cenderung parsial serta partisipasi yang minim

**Sumber** : Data yang telah diolah oleh penulis, 2025

### 1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik terbagi menjadi dua suku kata, yaitu “administrasi” dan “publik”. Kata administrasi secara bahasa berasal dari bahasa latin (yunani) yang terbagi menjadi dua kata “*ad*” dan “*ministrate*” yang memberikan sebuah makna berupa memenuhi atau melayani (Malawat, 2022). Secara sederhana kata administrasi adalah sebuah proses untuk memberikan pelayanan atau pengaturan. Kata “publik” memiliki makna umum, orang masyarakat secara luas.

Administrasi publik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan pengelolaan dan koordinasi sumber daya dan aparatur negara untuk sebuah perencanaan, implementasi dan pengawasan atas kebijakan publik yang sudah ditetapkan (Chandler & Plano, 1988) dalam (Keban, 2022). Administrasi publik dapat diartikan sebagai kegiatan pengelolaan kepentingan publik dan pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. Tujuannya sebagai ilmu adalah untuk menyelesaikan masalah masalah yang terjadi di masyarakat.

Administrasi publik adalah sebuah proses untuk menciptakan barang dan jasa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Definisi ini melihat bahwa administrasi publik menghasilkan barang dan jasa untuk pelayanan publik sama dengan kegiatan ekonomi (Dimock, Dimock & Fox, 1960) dalam (Keban, 2022). Dalam konteks politik, administrasi publik adalah disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana penerapan politik negara (Arifin Abdurachman, 1959) dalam (Meutia, 2017). Definisi ini memandang bahwa administrasi publik adalah sebagai praktik nyata di dalam sebuah pemerintahan.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diberikan sebuah kesimpulan. Administrasi publik diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya dan aparatur negara dengan cara yang rasional. Tahapan rasional tersebut melalui perencanaan, implementasi dan pengawasan publik untuk memberikan pelayanan dan memberikan solusi atas masalah publik yang dihadapi. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah melalui praktik nyata di dalam praktik pemerintahan.

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma adalah penjelasan konsep tentang cara pandang, prinsip dasar dan metode yang digunakan oleh masyarakat ilmiah pada saat itu untuk memecahkan suatu masalah. Terdapat enam paradigma administrasi publik sebagai berikut :

1. Paradigma 1 (1900 – 1926) Dikotomi Politik dan Administrasi.

Tokoh administrasi publik yang terkenal di masa ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow melalui tulisan karya yang berjudul *“Politics and Administration”* tahun 1900. Karya buku ini menekankan pemisahan antara administrasi dan politik dalam implementasinya. Secara sederhana paradigma ini memberikan pandangan bahwa politik harus berfokus pada aspirasi atau ekspresi masyarakat, sedangkan administrasi berfokus pada implementasi dari kebijakan atau kehendak masyarakat. Penjelmaan pemisahan politik dan administrasi ini digambarkan melalui pemisahan badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif yang bertugas untuk menerima ekspresi masyarakat dan badan eksekutif bertugas untuk menjalankan kebijakan atas ekspresi masyarakat. Badan legislatif

bertugas untuk membantu eksekutif dalam mewujudkan ekspresi masyarakat. Pada paradigma ini belum memberikan aspek fokus, yaitu sebuah cara atau memecahkan masalah dan masih menekankan aspek lokus, yaitu tempat dimana cara memecahkan masalah tersebut diterapkan, yaitu *government bureaucracy*.

## 2. Paradigma 2 (1927 – 1937) Prinsip – Prinsip Administrasi

Tokoh administrasi publik yang terkenal pada masa ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick dan tokoh manajemen klasik Fayol dan Taylor. Paradigma ini menjelaskan proses administrasi publik dengan menggunakan prinsip *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting* ( POSDCORB). Pandangan ini menyatakan bahwa prinsip ini bisa diterapkan dimanapun, artinya dapat diterapkan secara universal oleh organisasi pemerintah dan non pemerintah. Paradigma ini lebih menekankan fokus, yaitu sebuah cara memecahkan sebuah masalah.

## 3. Paradigma 3 (1950 – 1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik.

Tokoh administrasi publik yang terkenal pada masa ini adalah Morstein – Marx dan Herbert Simon. Morstein Marx mempertanyakan adanya pemisahan antara administrasi dan politik sebagai hal yang tidak realistis. Herbert Simon memberikan kritikan tentang ketidakseragaman prinsip administrasi dan menilai bahwa prinsip administrasi tidak berlaku universal. Dampak dari hal ini memunculkan paradigma baru tentang administrasi publik sebagai ilmu politik. Paradigma baru ini memiliki fokus di birokrasi

pemerintahan dan memiliki kelemahan fokus yang menjadi buram yang disebabkan prinsip administrasi publik yang lemah.

4. Paradigma 4 (1956 – 1970) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi.  
Pada paradigma ini terjadi perkembangan pedoman manajemen yang sudah populer pada masa sebelumnya. Prinsip manajemen tersebut dikembangkan secara mendalam dan ilmiah. Paradigma ini berfokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern (melalui analisis sistem, metode kuantitatif dan riset operasi). Paradigma ini memiliki 2 fokus pengembangan yang berbeda, yaitu antara ilmu administrasi murni dan kebijakan publik. Hal ini membuat lokus tidak jelas
5. Paradigma 5 (1970 – 1990) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik.  
Paradigma ini menunjukkan bahwa fokus dan lokus administrasi publik sudah terdefinisi dengan jelas. Fokusnya terdiri atas teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik, sementara lokusnya pada paradigma ini terbagi menjadi masalah dan kepentingan publik. Paradigma ini hadir sebagai upaya menyempurnakan paradigma sebelumnya terkait dengan fokus dan lokus yang tidak memiliki kejelasan. Administrasi publik telah lahir kembali dan sudah menghilangkan ketidakjelasan antara ilmu politik dan ilmu administrasi.
6. Paradigma 6 (1990 – Sekarang) *Governance*  
Paradigma *Governance* memiliki ciri khas yang membedakannya dengan paradigma yang sebelumnya. Paradigma sebelumnya lebih menekankan pada *Government* atau pemerintah. Artinya, administrasi publik lebih berfokus

pada sektor pemerintah dan belum melihat unsur lainnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Paradigma *governance* ingin mengubah pandangan tersebut dengan melihat peran publik dalam mendukung roda pemerintahan. Paradigma *Governance* tidak hanya berfokus pada pemerintah, tetapi melibatkan aktor lain untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Aktor yang terlibat, seperti masyarakat dan swasta yang akan terlibat dalam cara formulasi dan implementasi sebuah kebijakan publik.

Paradigma ini menekankan pendekatan kolaboratif, fleksibel dan berbasis jejaring sehingga sangat berbeda dari model birokrasi yang bersifat hierarki. Pengelolaan publik di masa modern ini menuntut untuk menjadi lebih transparan, efisien dan partisipasi. Paradigma ini membawa konsep demokrasi. Masyarakat memiliki peran yang lebih besar dan administrasi negara berperan sebagai pelayan publik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peran ini diharapkan pelayanan publik akan semakin baik, masyarakat memiliki nilai sebagai orang yang harus dihargai bukan sebagai produktivitas semata.

Pada penulisan penelitian ini termasuk ke dalam paradigma ke 6, yaitu *Governance*. Administrasi publik memiliki fokus terhadap pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini akan membahas tentang teori koordinasi & manajemen publik yang diterapkan oleh organisasi publik dalam rangka menyelesaikan masalah publik yang memerlukan kerja sama pihak lain. Fokus dari penelitian ini adalah koordinasi yang diterapkan oleh BPBD Kota

Semarang dalam menangani pasca bencana alam tanah longsor di Kota Semarang.

#### **1.6.4 Manajemen Publik**

Manajemen diperlukan organisasi untuk mengatur penyelenggaraan organisasi sehingga mampu mencapai tujuan organisasi tersebut. Manulang dalam (Firdausijah, 2023) mendefinisikan manajemen merupakan perpaduan seni dan ilmu dalam mengatur sumber daya manusia melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, serta pengawasan demi mencapai tujuan organisasi. Pada instansi pemerintah membutuhkan manajemen publik untuk memberikan pelayanan publik, maka dalam pelaksanaan diperlukan manajemen yang efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan agar bisa mencapai tujuan, yaitu kepuasan dari masyarakat. Sektor publik adalah wilayah tugas pemerintah sebagai wakil negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara memproduksi, pendistribusian dan mengalokasikan sumber daya (Firdausijah, 2023)

Pada praktiknya manajemen dan kebijakan publik saling berhubungan. Manajemen berperan dalam melaksanakan serta mengelola sumber daya manusia dan non manusia berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Manajemen publik merupakan penerapan prinsip manajemen dalam lingkungan instansi pemerintah (Keban, 2022). Definisi ini memandang bahwa manajemen publik diterapkan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, Manajemen publik adalah bidang interdisipliner ilmu yang menggabungkan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, sumber daya manusia, keuangan fisik, informasi

dan politik (Keban, 2022). Definisi ini berpandangan bahwa dalam manajemen publik memerlukan pelibatan fungsi manajemen, sumber daya manusia dan non manusia untuk melaksanakan manajemen publik.

Manajemen publik dapat diartikan sebagai proses manajerial yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Nor Ghofur, 2014) dalam (Firdausijah, 2023). Definisi memberikan pandangan bahwa manajemen publik memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tahapan perencanaan, pengorganisasi dan pengontrolan. Manajemen publik adalah cara organisasi sektor publik diatur, dikelola serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan secara sistematis (Davis et al., 2020). Definisi berpandangan bahwa manajemen publik adalah bentuk pengelolaan, pengaturan dan akuntabilitas dari organisasi sektor publik atas kinerja yang sudah dilakukan.

Secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen publik adalah upaya pelibatan fungsi manajemen mulai unsur sumber daya manusia dan non sumber daya manusia yang dipadukan dengan fungsi manajemen untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

#### **1.6.5 Konsep Koordinasi**

Kata *coordination* berasal dari kata *co-* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Koordinasi dalam organisasi dilakukan dalam rangka bergerak secara bersama. Sistem organisasi menuntut setiap unit kerja dan individu untuk bekerja secara terkoordinasi, bukan secara sendiri – sendiri. Setiap unit tidak diperbolehkan

mengambil alih tugas unit lain, serta seluruh personel harus menjalankan tugas sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditentukan.

Koordinasi merupakan wewenang untuk mengarahkan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan berbagai aktivitas yang berbeda – beda agar seluruhnya berjalan searah menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu (Ndraha, 2015). Pendapat diatas berfokus pada koordinasi yang melibatkan semua aktivitas dalam mencapai tujuan. Koordinasi merupakan proses untuk mengarahkan, menyatukan, dan menyelaraskan berbagai unsur manajemen (6M) serta tugas bawahan agar seluruhnya berjalan selaras dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2006). Pendapat diatas menekankan bahwa koordinasi bagian penting dari manajemen yang melibatkan semua unsur untuk mencapai tujuan organisasi. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Pariata Westa, koordinasi adalah aktivitas yang mengarahkan unit kerja, pekerjaan dan personil organisasi agar semua berjalan dengan tertib, tidak bentrok dan tetap pada upaya mencapai sebuah tujuan (Pariata Westa) dalam (Madjid, 2023).

Koordinasi merupakan upaya pencapaian tujuan organisasi dengan cara menggabungkan kegiatan dan sasaran yang terpisah (Stoner) dalam (Madjid, 2023). Pendapat yang sama di ungkapkan oleh yang menyatakan bahwa koordinasi adalah yang upaya pencapaian sasaran yang sudah ditentukan dengan cara mempersatukan, menyesuaikan dan mengaitkan aktivitas anggota tim (Muktamar et al., 2024)

Secara sederhana dapat diberi kesimpulan bahwa koordinasi adalah upaya yang dilakukan secara bersama sama dengan cara mengarahkan, menggerakkan dan

penyatuan personel atau unit kerja dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam lingkup manajemen. Koordinasi termasuk ke dalam teori manajemen yang terbagi ke dalam perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*staffing*), penyusunan staf (*directing*), koordinasi (*coordinating*), pelaporan (*reporting*) dan penganggaran (*budgeting*) (Madjid, 2023).

Melaksanakan koordinasi dalam sebuah organisasi memiliki tujuan. Tujuan koordinasi adalah untuk (Hasibuan, 2006) :

1. Koordinasi berfungsi untuk mengarahkan seluruh aktivitas organisasi agar tetap fokus pada pencapaian tujuan. Setiap pekerjaan perlu diarahkan secara tepat sehingga tetap berada pada jalurnya dan selaras dengan sasaran organisasi.
2. Koordinasi penting dalam rangka membimbing dan mengarahkan keterampilan individu untuk dapat dioptimalkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Dengan melakukan koordinasi potensi terjadinya kekosongan atau tumpang tindih pekerjaan dapat dikurangi. Hal ini terjadi karena setiap unit kerja sudah diarahkan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga membuat pekerjaan menjadi terdistribusi dengan lebih jelas dan merata.
4. Koordinasi membantu dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Pengaturan yang baik dari setiap unit kerja membuat organisasi dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan lingkup pekerjaan dan tujuan organisasi.

Organisasi terbentuk karena kelompok dan individu bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu sehingga koordinasi diperlukan untuk pembagian kerja yang efektif. Setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda dalam melaksanakan koordinasi. Terdapat 2 tipe koordinasi utama, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal (Hasibuan, 2006) :

1. Koordinasi vertikal

Koordinasi ini dilakukan melalui proses integrasi, pembimbingan oleh atasan terhadap unit kerja, kegiatan dan satuan kerja yang berada dibawah kewenangan dan tanggung jawabnya.

2. Koordinasi horizontal

Koordinasi yang bentuk penyatuan dan pengarahan yang berlangsung pada tingkat organisasi yang setara. Koordinasi horizontal terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, *interdisciplinary*, yaitu koordinasi untuk menyatukan tindakan, menciptakan disiplin dan mengarahkan antar unit yang memiliki kesamaan tugas secara internal atau eksternal. Kedua *interrelated*, yaitu koordinasi antar instansi yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling bergantung dan terkait satu sama lain pada level organisasi yang setara.

Pada pelaksanaan koordinasi terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam menganalisis keberhasilan koordinasi, salah satu teori yang digunakan dalam analisis koordinasi adalah teori dari Taliziduhu Ndraha. Indikator koordinasi menurut (Ndraha, 2015) :

1. Informasi, komunikasi dan teknologi

Informasi berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Komunikasi menjadi sarana penyampaian informasi antar pihak. Koordinasi yang efektif sangat dipengaruhi oleh komunikasi karena pada dasarnya koordinasi merupakan aktivitas pengelolaan informasi. Semakin kompleks dan penuh ketidakpastian suatu tugas maka semakin besar pula kebutuhan akan informasi yang akurat. Teknologi digunakan dalam mendukung kelancaran koordinasi melalui adanya penyebaran, pengolahan dan pertukaran informasi.

2. Kesadaran terhadap pentingnya koordinasi dari setiap pihak yang terlibat

Komunikasi antar pihak dapat terjalin baik dengan kesadaran dari bagian proses aktif yang mendorong individu untuk bertindak dan membuat keputusan. Setiap pihak yang terlibat memahami urgensi koordinasi dan menjalankannya sebagai bagian dari tanggung jawab dalam setiap tugas.

3. Kompetensi *stakeholders*

Setiap aktor harus memiliki kemampuan dan pengambilan keputusan agar proses koordinasi tidak terhambat. Pembuatan jadwal koordinasi melalui kalender pemerintahan yang dipatuhi secara konsisten dari tingkat atas sampai bawah akan memastikan kegiatan koordinasi berjalan terarah dan terstruktur.

4. Kesepakatan dan komitmen

Koordinasi dapat berjalan baik apabila aktor yang terlibat memiliki kesepakatan dan komitmen untuk melaksanakannya. Komitmen harus dibangun secara institusional dan formal agar menjadi landasan dalam kegiatan organisasi.

5. Penetapan kesepakatan oleh pihak yang terlibat

Setiap bentuk koordinasi memerlukan adanya penetapan kesepakatan antar pihak. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang memiliki persepsi dan tujuan yang sejalan dalam melaksanakan program atau kebijakan yang sudah direncanakan.

6. Insentif koordinasi

Sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada pihak yang tidak mematuhi kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam koordinasi, maka bagi pihak atau aktor yang tidak menepati kesepakatan diberikan sanksi dari atasan agar koordinasi tetap berjalan.

7. *Feedback* (umpan balik)

Koordinasi yang baik harus memiliki mekanisme umpan balik. Umpan balik mempunyai fungsi sebagai evaluasi dan masukan dalam proses koordinasi berikutnya sehingga mampu memperbaiki kekurangan dan memperkuat sinergi antar pihak yang terlibat.

Pada pelaksanaan proses koordinasi terdapat faktor yang mempengaruhi koordinasi (Handayani, 2006) :

1. Hambatan koordinasi vertikal (struktural)

Hambatan yang muncul pada hubungan kerja antara atasan dan bawahan dalam struktur hierarki organisasi. Hambatan ini biasanya disebabkan oleh pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang belum dirumuskan secara jelas di setiap unit kerja. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap tata kerja dan prosedur antar bagian dapat memunculkan keraguan dalam pelaksanaan perintah. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan koordinasi antar pihak yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan menjadi kurang efektif.

2. Hambatan koordinasi horizontal (fungsional)

Hambatan ini terjadi antar unit kerja atau pejabat yang memiliki kedudukan sejajar dan tidak berada dalam satu garis komando. Hambatan ini biasanya timbul karena tidak adanya hubungan hierarki yang mengikat sehingga koordinasi bergantung pada kesadaran dan kemauan kerja sama dari masing – masing pihak. Penyebab dari hambatan ini adalah kurangnya komunikasi antar unit, lemahnya integrasi fungsi, dan ego sektoral. Hal ini membuat koordinasi horizontal relatif lebih sulit dilaksanakan dibandingkan koordinasi vertikal karena tidak adanya kewenangan formal yang mampu mengharuskan pihak lain mengikuti keputusan bersama.

### 1.6.6 Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor diartikan sebagai pergerakan tanah atau batuan yang terlepas dari massa stabil dan bergerak menuruni lereng karena pengaruh gravitasi, baik secara rotasi maupun translasi. Peristiwa ini merupakan bentuk erosi yang memindahkan material dalam jumlah besar dalam waktu singkat (Uca & Maru, 2019).

Terdapat beberapa kondisi yang membuat terjadinya longsor, seperti sebagai berikut (Uca & Maru, 2019) :

1. Kemiringan lereng yang tinggi meningkatkan potensi pergerakan material tanah dalam volume besar ke arah bawah lereng.
2. Adanya lapisan kedap air yang bersifat lunak di bawah permukaan tanah dapat menjadi bidang gelincir yang memicu pergerakan tanah.
3. Masuknya air ke dalam tanah (infiltrasi) menyebabkan kejenuhan pori – pori tanah, sehingga menambah beban dan meningkatkan potensi pergerakan pada lapisan di atas lapisan kedap air.

Tanda tanda terjadinya longsor dapat dikenali dari munculnya retakan pada lereng yang sejajar dengan arah tebing setelah hujan. Selain itu, indikasi lainnya meliputi kemunculan mata air baru secara tiba tiba serta jatuhnya kerikil dari tebing yang rapuh. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya longsor (Nandi, 2007) :

1. Hujan

Peningkatan intensitas curah hujan dapat meningkatkan ancaman tanah longsor. Pada musim kemarau, terjadi penguapan air dalam jumlah besar di

permukaan tanah yang menyebabkan pori – pori tanah mengalami retakan dan merekah. Ketika curah hujan tinggi, tanah dengan cepat menjadi jenuh air. Kondisi ini menyebabkan air meresap dan terkumpul di bagian dasar lereng sehingga memicu pergerakan lateral. Keberadaan vegetasi, seperti pohon dapat membantu menyerap air, sementara akar tanaman berperan dalam mengikat tanah agar lebih stabil.

## 2. Lereng terjal

Kondisi lereng yang curam meningkatkan gaya pendorong terjadinya longsor. Lereng tersebut dapat terbentuk akibat pengaruh mata air, gelombang laut, angin serta erosi oleh aliran sungai. Apabila sudut lereng sangat curam hingga mendekati  $180^\circ$  dengan bagian ujung yang terjal dan bidang gelincir yang relatif datar, maka potensi longsor akan semakin besar.

## 3. Tanah yang kurang padat dan tebal.

Tanah dengan karakteristik ini berpeluang mengalami longsor terutama saat hujan. Kerentanan ini disebabkan oleh sifatnya yang menjadi lembek ketika basah dan retak saat mengalami panas berlebih.

## 4. Beban tambahan di lereng

Kegiatan pembangunan di lereng dan pergerakan kendaraan membuat terjadinya menambah gaya pendorong terjadinya longsor. Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya penurunan tanah dan terbentuknya retakan menuju lembah.

## 5. Terdapat material timbunan pada tebing

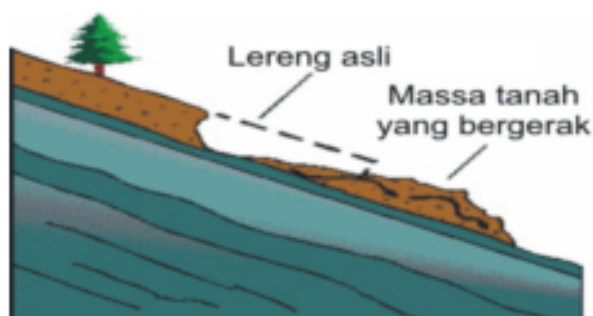
Pada kegiatan pengembangan permukiman, dilakukan pemotongan lereng dan pengurugan lembah. Tanah timbunan tersebut belum memiliki kestabilan, seperti tanah alami, sehingga ketika hujan turun dapat memicu penurunan tanah yang disertai retakan.

Tanah longsor terbagi menjadi 6 jenis, yaitu : longsor translasi, longsor rotasi, longsor pergerakan blok, runtuh batuan, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan (Nandi, 2007). Jenis longsor yang dominan terjadi di Indonesia, yaitu jenis longsor translasi dan rotasi. Jenis longsor yang paling sering mengakibatkan korban jiwa adalah jenis longsor aliran bahan rombakan.

#### 1. Longsor Translasi

Longsor translasi adalah perpindahan tanah dan batuan yang terjadi pada bidang gelincir yang berbentuk rata atau sedikit bergelombang.

**Gambar 1. 7 Longsor Translasi**



**Sumber :** Buku Longsor, Nandi (2007)

#### 2. Longsor Rotasi

Longsor rotasi adalah perpindahan tanah dan batuan yang terjadi pada bidang gelincir dengan bentuk cekung.

**Gambar 1. 8 Longsoran Rotasi**

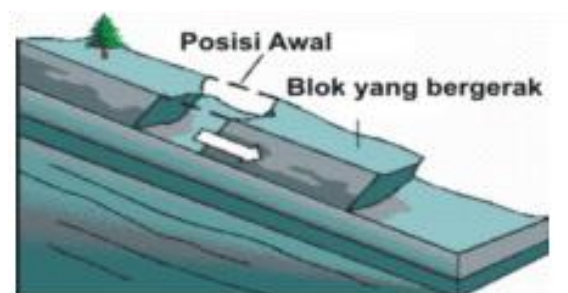


**Sumber** : Buku Longsor, Nandi (2007)

### 3. Pergerakan blok

Pergerakan blok adalah pergeseran massa batuan yang terjadi pada bidang gelincir berbentuk rata, yang sering disebut sebagai longsoran translasi blok batu.

**Gambar 1. 9 Longsoran Pergerakan Blok**



**Sumber** : Buku Longsor, Nandi (2007)

### 4. Runtuhan Batuan

Runtuhan batuan adalah longsoran berupa bongkahan batu besar yang bergerak ke bawah melalui proses jatuh bebas dengan jangkauan yang

cukup jauh. Kejadian ini biasanya terjadi pada lereng terjal dan menggantung, termasuk di wilayah pesisir.

**Gambar 1. 10 Longsor Runtuhan Batuan**

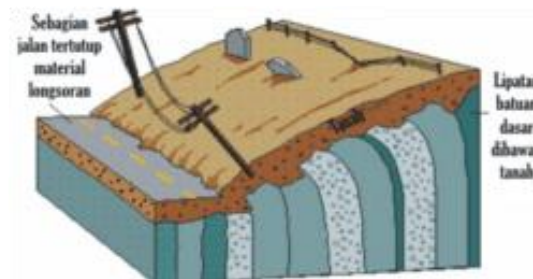


**Sumber** : Buku Longsor, Nandi (2007)

#### 5. Rayapan tanah

Jenis longsor rayapan tanah ditandai dengan pergerakan yang lambat serta membawa material tanah berbutir kasar dan halus. Longsor ini sulit dideteksi, namun dalam waktu lama dapat mengakibatkan kemiringan pada berbagai struktur, seperti, tiang, pohon, dan bangunan.

**Gambar 1. 11 Longsor Rayapan Tanah**

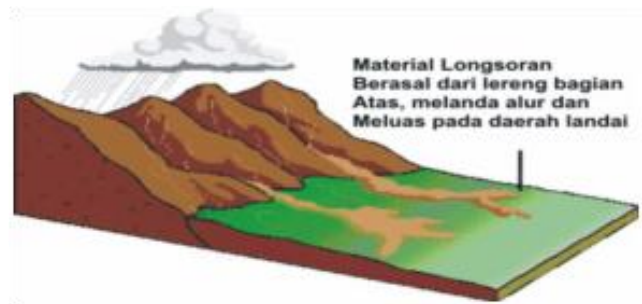


**Sumber** : Buku Longsor, Nandi (2007)

#### 6. Aliran bahan rombakan

Aliran bahan rombakan merupakan jenis longsor yang terjadi ketika massa tanah bergeser karena dorongan air. Laju aliran sangat ditentukan oleh faktor volume, tingkat kemiringan lereng, tekanan air, dan karakteristik material. Longsoran tipe ini biasanya terjadi di wilayah lembah dan aliran sungai di sekitar gunung berapi. Material yang terbawa dalam jumlah besar dapat menyebabkan tingginya risiko korban jiwa.

**Gambar 1. 12 Longsoran Aliran Bahan Rombakan**

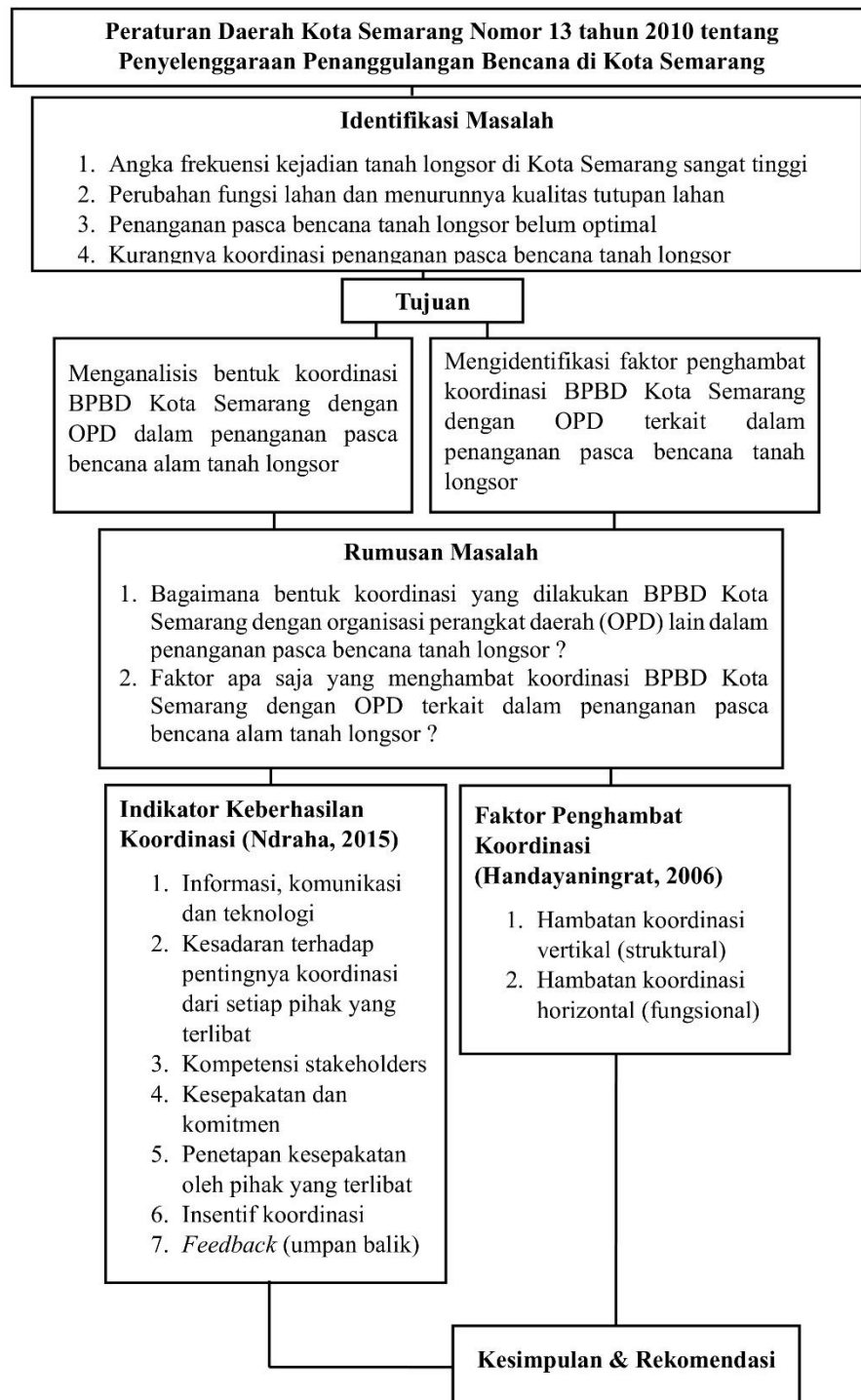


**Sumber :** Buku Longsor, Nandi (2007)

## 1.7 Kerangka Teori

Landasan peraturan dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang diatur Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penanganan pasca bencana tanah longsor. Elemen teori yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan teori koordinasi dari Taliziduhu Ndraha (2015) dan teori faktor penghambat koordinasi Handayani (2006). Maka dirumuskan kerangka berpikir yang mengacu pada tujuan penelitian, yaitu menganalisis bentuk koordinasi BPBD Kota Semarang dengan OPD dalam penanganan pasca bencana tanah longsor dan mengidentifikasi faktor penghambat koordinasi BPBD Kota Semarang dengan OPD terkait dalam penanganan pasca bencana tanah longsor.

**Gambar 1. 13 Kerangka Teori**



**Sumber :** Data yang telah diolah penulis, 2025

## 1.8 Fenomena Penelitian

Pada penelitian ini konsep yang akan diteliti adalah koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam menangani pasca bencana alam tanah longsor. Konsep koordinasi dalam fenomena ini adalah melihat bentuk koordinasi yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam menangani pasca bencana alam tanah longsor. Koordinasi ini perlu dilakukan dilihat dari tingginya angka kejadian bencana alam tanah longsor di Kota Semarang dalam 3 tahun terakhir yang sudah diuraikan di latar belakang.

Penelitian ini akan terfokus pada konsep yang dijabarkan dibawah ini untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap definisi dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Koordinasi adalah yang upaya pencapaian sasaran yang sudah ditentukan dengan cara mempersatukan, menyesuaikan dan mengaitkan aktivitas anggota tim, unit kerja atau individu.
2. Bencana alam tanah longsor merupakan sejumlah peristiwa pergerakan massa tanah atau batuan dari lereng yang terjadi secara tidak terduga atau bertahap yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi dan faktor dari eksternal berupa aktivitas manusia, kondisi geologi, dan curah hujan yang tinggi.
3. Faktor penghambat koordinasi merupakan kondisi yang menghambat pemerintah dalam menjalankan tugas dengan baik, diperlukan adanya keserasian, seirama dan selaras antar instansi dalam menjalankan tugas

Koordinasi dalam penanganan pasca bencana alam tanah longsor dapat dinilai melalui proses 6 analisis. Pertama analisis informasi, komunikasi dan teknologi. Kedua analisis kesadaran pentingnya koordinasi. Ketiga kompetensi partisipan. Keempat kesepakatan dan komitmen. Kelima penetapan kesepakatan kelima insentif koordinasi dan yang terakhir *feedback* (umpan balik) :

1. Informasi, komunikasi dan teknologi informasi. Informasi menjadi dasar utama dalam proses pengambilan keputusan saat bencana. Komunikasi berperan sebagai media penyampaian informasi antar pihak yang dilakukan secara horizontal atau vertikal. Penggunaan teknologi informasi membantu dalam memperlancar koordinasi dengan bantuan sistem peringatan dini, media, *website* atau aplikasi kebencanaan dalam penyebaran informasi.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi. Semua OPD yang terlibat dalam penanganan bencana harus memiliki kesadaran akan pentingnya koordinasi. Kesadaran ini terlihat dari adanya setiap pihak yang memahami urgensi koordinasi dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab.
3. Kompetensi *stakeholders*. BPBD bersama *stakeholders* atau OPD lain harus memastikan bahwa personel yang terlibat memiliki kemampuan dan kewenangan sesuai bidang dan mampu mengambil keputusan yang tepat di lapangan. Pembuatan jadwal koordinasi untuk memastikan kegiatan koordinasi berjalan terarah dan terstruktur.

4. Kesepakatan dan komitmen. Koordinasi BPBD dapat berjalan baik apabila terdapat kesepakatan dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. Komitmen dibangun secara formal dan institusional agar menjadi landasan kegiatan organisasi.
5. Penetapan kesepakatan. Keselarasan tujuan antar stakeholder diperlukan untuk mempermudah koordinasi. Penetapan kesepakatan bersama memastikan semua pihak memiliki pemahaman dan pandangan yang sama dalam penanganan bencana tanah longsor.
6. Insentif koordinasi. Untuk menjaga koordinasi tetap berjalan maka diperlukan mekanisme sanksi bagi pihak yang tidak menepati kesepakatan. Contohnya adalah teguran administratif atau pengurangan peran dalam koordinasi kebencanaan.
7. *Feedback* atau umpan balik. Umpan balik diperlukan sebagai upaya evaluasi atas proses koordinasi yang sudah dilakukan. Hasil evaluasi menjadi masukan penting untuk memperbaiki kelemahan, memperkuat sinergi dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana di masa depan.

Proses dalam menciptakan koordinasi yang baik akan didukung dari faktor – faktor tertentu dan dihadapkan oleh hambatan ketika ingin mencapai tujuan. Faktor yang menjadi penghambat dalam koordinasi antar OPD dalam penanganan pasca bencana alam tanah longsor meliputi :

1. Hambatan koordinasi vertikal (struktural). Hambatan yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam struktur organisasi BPBD. Kondisi ini memiliki

potensi untuk menurunkan efektivitas koordinasi antara pihak pengarah dan pelaksana di lapangan ketika terjadi situasi darurat bencana

2. Hambatan koordinasi horizontal (fungsional). Hambatan yang timbul antar instansi atau unit kerja yang memiliki kedudukan sejajar dan tidak berada dalam satu garis komando. Kondisi ini membuat koordinasi horizontal lebih sulit dilakukan karena tidak ada otoritas formal yang dapat memaksa pihak lain untuk mengikuti keputusan bersama.

**Tabel 1. 2 Tabel Fenomena Penelitian**

No	Fenomena	Definisi Konsep	Sub Fenomena	Operasionalisasi Konsep	Informan
1	Koordinasi	Koordinasi adalah upaya pencapaian sasaran yang sudah ditentukan dengan cara mempersatukan, menyesuaikan dan mengaitkan aktivitas anggota tim, unit kerja atau individu.	Informasi, komunikasi dan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi : unsur komunikasi dalam proses koordinasi</li> <li>2. Teknologi : penggunaan teknologi untuk komunikasi dalam proses koordinasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid kedaruratan &amp; logistik</li> <li>2. Sekretaris BPBD</li> </ol>
			Kesadaran pentingnya koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keikutsertaan <i>stakeholders</i> berperan aktif dalam koordinasi</li> <li>2. <i>Stakeholders</i> memahami pentingnya koordinasi dalam menjalankan tupoksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris BPBD</li> <li>2. Kabid rehabilitasi &amp; rekonstruksi</li> </ol>
			Kompetensi <i>stakeholders</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas dan kemampuan <i>stakeholders</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid rehabilitasi</li> </ol>

No	Fenomena	Definisi Konsep	Sub Fenomena	Operasionalisasi Konsep	Informan
				atau OPD untuk kontribusi menjalankan koordinasi 2. Ketersediaan jadwal koordinasi antar <i>stakeholders</i>	& rekonstruksi 2. Kasubag umum
			Kesepakatan dan komitmen	1. Bentuk kesepakatan dan komitmen yang terbentuk secara formal dan institusional	1. Sekretaris BPBD 2. Kasubag umum
			Penetapan kesepakatan	1. Model koordinasi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat 2. Proses penetapan kesepakatan koordinasi	1. Sekretaris BPBD 2. Kasubag umum 3. Kabid rehabilitasi & rekonstruksi
			Insentif koordinasi	1. Keberadaan sanksi dalam forum koordinasi	1. Kasubag umum 2. Sekretaris BPBD 3. Kabid kedaruratan & logistik
			<i>Feedback</i> (umpan balik)	1. Sikap dan bentuk penerimaan <i>stakeholders</i> atau OPD terhadap	1. Kabid rehabilitasi & rekonstruksi 2. Sekretaris BPBD

No	Fenomena	Definisi Konsep	Sub Fenomena	Operasionalisasi Konsep	Informan
				masukan, saran serta mekanisme evaluasi	3. Kasubag Umum
2	Faktor Penghambat	Faktor penghambat koordinasi merupakan kondisi yang menghambat pemerintah dalam menjalankan tugas dengan baik, diperlukan adanya keserasian, seirama dan selaras antar instansi dalam menjalankan tugas	Hambatan koordinasi vertikal (struktural)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan kerja pimpinan dan pelaksana</li> <li>2. Kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab</li> <li>3. Pemahaman terhadap SOP dan tata kerja antar bagian</li> <li>4. Kendala dalam pelaksanaan instruksi dari atasan saat situasi darurat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris BPBD</li> <li>2. Kasubag umum</li> <li>3. Kabid pelaksana</li> </ol>
			Hambatan koordinasi horizontal (fungsional)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan kerja BPBD dengan <i>stakeholders</i> lain</li> <li>2. Mekanisme komunikasi lintas instansi</li> <li>3. Kerja sama antar OPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid kedaruratan &amp; logistik</li> <li>2. Kabid rehabilitasi &amp; rekonstruksi</li> <li>3. Sekretaris</li> </ol>

**Sumber :** Data yang telah diolah oleh penulis, 2025

## **1.9 Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan dan manfaat tertentu (Harbani Pasolong, 2020). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menggali serta memahami makna yang dibentuk oleh individu atau kelompok tertentu terkait dengan permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Penelitian melibatkan cara yang rasional yang masuk akal dalam penalaran manusia. Penelitian dilakukan untuk memperoleh fakta dan prinsip sistematis dalam mewujudkan kebenaran. Dengan melakukan penelitian maka dapat diperoleh sebuah hasil yang dapat digunakan untuk menelaah masalah, menyelesaikan masalah dan mencegah masalah (Sugiyono, 2013). Data – data penelitian yang diperoleh melalui penelitian kualitatif berupa kata kata, kalimat, gambar dan tidak memberi penekanan kepada angka, penggunaan angka hanya digunakan sebagai pelengkap data.

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjabarkan apa yang terjadi sesuai kondisi saat pelaksanaan penelitian (Harbani Pasolong, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkap permasalahan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Cara dalam menggambarkan kondisi fakta lapangan dapat melalui membuat uraian, memberi gambaran, mencatat, mendokumentasikan, menganalisis dan menginterpretasikan sesuai kondisi di lokasi penelitian.

Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini adalah :

- Peneliti ingin mengamati kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara langsung
- Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggali koordinasi antar OPD melalui BPBD Kota Semarang dalam menangani pasca bencana alam tanah longsor di Kota Semarang. Maka perlu untuk menggunakan penelitian deskriptif yang memberikan penekanan terhadap pandangan tentang makna kejadian yang sebenarnya terjadi di dalamnya

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini menitikberatkan pada koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang dalam penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang. Berdasarkan peraturan daerah kota semarang nomor 13 tahun 2010, BPBD Kota Semarang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana serta menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi. Penelitian ini akan mengkaji faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan koordinasi BPBD Kota Semarang pada tahap pasca bencana tanah longsor.

Lokus penelitian ini adalah BPBD Kota Semarang yang berada di Kompleks Terminal Penggaron, Jl. Brigjen Sudiarto KM 11, Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penulis memilih lokasi ini karena secara objektif kota semarang dalam 3 tahun terakhir memiliki tingkat

kejadian longsor yang relatif tinggi dibanding bencana lain, meskipun secara jumlah tahunan mengalami penurunan, selain itu secara subjektif penulis merasa BPBD Kota Semarang memiliki aksesibilitas yang baik dan mudah dijangkau bagi peneliti.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah koordinasi BPBD Kota Semarang dalam menangani pasca bencana alam tanah longsor. Pemilihan subjek penelitian sangat penting untuk mendapatkan informasi yang memahami secara langsung dan berkaitan dengan masalah penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kesesuaian subjek penelitian dengan tujuan penelitian guna memperoleh informan yang relevan dalam penelitian. Pemilihan informan berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki dan sesuai dengan topik penelitian :

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Semarang
3. Kasubag Umum BPBD Kota Semarang
4. Sekretaris BPBD Kota Semarang
5. Staff Sumber Daya Air & Drainase Dinas PU Kota Semarang

### **1.9.4 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang didapatkan melalui pengumpulan data yang tidak bisa diukur dengan skala numerik (Widodo et al., 2023). Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui berbagai teknik, seperti observasi di lapangan, analisis dokumen, dan diskusi

terfokus. Data kualitatif terbagi menjadi beberapa macam jenis, seperti observasi, transkrip, berita acara pertemuan dan catatan sejarah (Sembiring et al., 2024)

### **1.9.5 Sumber Data**

Penelitian kualitatif dapat menggunakan data dari 2 sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti (Harbani Pasolong, 2020). Data primer berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui proses wawancara dengan informan yang dijadikan sampel penelitian. Data tersebut direkam atau dicatat oleh peneliti. Pada penelitian ini, data primer adalah berupa hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kasubag Umum, Staff Sumber Daya Air & Drainase Dinas PU Kota Semarang

Data sekunder merupakan data kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dari orang lain dan bukan dari sumber pengolahnya (Yusuf, 2017). Terdapat beberapa data yang termasuk ke data sekunder, yaitu data bentuk teks berupa dokumen, surat – surat dan pengumuman. Penelitian ini memanfaatkan data gambar yang berasal dari foto atau billboard yang ada. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui dokumen milik BPBD Kota Semarang, hasil studi dan sebagainya.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah data yang dikumpulkan melalui mencatat informasi penelitian dengan memanfaatkan metode dan instrumen yang disesuaikan dengan

tujuan dari penelitian (Widodo et al., 2023). Pada metode ilmiah, pengumpulan data menjadi langkah krusial karena data yang terkumpul digunakan sebagai bahan analisis. Tujuan dari pengumpulan data adalah mendapatkan data yang valid agar kesimpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. (Widodo et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur yang sistematis dengan menerapkan standar tertentu untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan yang bertujuan untuk menggali informasi dari narasumber tentang pandangan, persepsi, pendapat, pola pikir tentang masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dokumen aktual yang berkaitan dengan objek penelitian berupa foto atau video selama proses dan kegiatan penelitian.

4. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku dan internet, laporan dan referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan proses mengolah data agar lebih mudah dipahami. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi beberapa kategori, yang terbagi ke dalam unit, aspek, pola dan pemilihan data penting untuk membantu dalam pengambilan kesimpulan. Analisis dan interpretasi data penelitian ini akan menggunakan program komputer yang dapat melakukan analisis data penelitian kualitatif, yaitu aplikasi Atlas.ti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan (Miles, 2014) dalam (Fiantika et al., 2022) :

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses analisis dengan cara menyeleksi data yang dianggap penting dan utama melalui tahapan proses seleksi, pemfokusan dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh berupa data hasil transkrip wawancara dengan narasumber yang berbentuk kata kata, catatan lapangan, dan dokumen (Fiantika et al., 2022). Pada proses analisis peneliti diberi kebebasan dalam memutuskan bagian data mana yang akan dikodekan dan diekspresikan. Reduksi data akan terus berlangsung sampai laporan akhir dibuat dan merupakan bagian dari analisis

#### **2. Penyajian data**

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat disusun dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, alur (flowchart), serta keterkaitan antar kategori. Penyajian data dilakukan secara deskriptif setelah dilakukan penyederhanaan data. Penyajian data memudahkan untuk melihat apa kondisi yang sebenarnya

terjadi, untuk menilai apakah kesimpulan yang dihasilkan sudah akurat atau masih memerlukan analisis lebih lanjut.

### 3. Penyusunan kesimpulan

Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan dari proses reduksi dan penyajian data merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penggunaan software komputer Atlas.ti mempermudah dalam membuat kesimpulan yang efektif, efisien dan sistematis. Atlas.ti digunakan saat analisis dan interpretasi data yang mempermudah dalam penyajian data dan pembuatan kesimpulan. Data yang sudah diolah di Atlas.ti akan mudah untuk dipindahkan dan memudahkan dalam proses analisis peneliti.

#### **1.9.8 Kualitas Data**

Pengujian keabsahan data dalam penelitian bertujuan untuk menjamin keakuratan dan kepercayaan data. Penelitian kualitatif memiliki fokus pada pengujian validitas dan reliabilitas. Data dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara informasi yang disampaikan peneliti dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Triangulasi memiliki tujuan untuk menghilangkan perbedaan dalam konstruksi realitas dan memperkuat keandalan dalam sebuah temuan penelitian.

Teknik triangulasi terbagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013) :

##### a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan metode untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan metode untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

c. Triangulasi waktu.

Triangulasi waktu sebuah cara yang dilakukan dengan mengambil data di waktu yang tepat. Waktu dapat mempengaruhi sebuah keandalan dan kualitas data. Pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara dan dilakukan saat pagi hari saat narasumber segar dapat membuat data menjadi lebih valid, serta kredibel.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber. Peneliti akan memperoleh jawaban dari pegawai BPBD Kota Semarang. Peneliti akan memeriksa berbagai sumber yang diperoleh selama penelitian yang berasal dari informan atau berasal dari data dokumen untuk menjadi bahan perbandingan dan verifikasi informasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan data sehingga hasil yang diperoleh selama penelitian bersifat valid, ilmiah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.